

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Strukturasi**

Untuk membantu menjelaskan isi dan mengatur ide-ide tentang cara kerja penelitian diperlukan teori. Teori merupakan analisis dan pernyataan mengenai bagaimana dan mengapa seperangkat fakta berkaitan satu sama lain. Pengertian ini menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens.

Teori strukturasi Anthony Giddens menyoroti hubungan antara individu dan kekuatan sosial yang memengaruhi tindakan manusia. Teori ini berupaya menyeimbangkan peran aktor dengan keterbatasan pilihan mereka dalam konteks sejarah dan tatanan sosial yang ada.<sup>16</sup> Di satu sisi, individu memiliki pengetahuan yang terbatas dan tidak sepenuhnya mengendalikan preferensi atas tindakannya. Namun, di sisi lain, mereka berperan dalam mereproduksi struktur sosial serta mendorong perubahan sosial.

Teori ini menegaskan adanya dualitas antara struktur dan agensi tanpa secara langsung menentukan faktor yang menyebabkan atau memperkuat keberadaannya. Pertama, Giddens menyatakan bahwa pelaku (individu) itu berbeda dari struktur sosial, atau bahwa keduanya saling berkaitan, sebenarnya adalah hal yang sudah jelas dan tidak memberi pemahaman yang baru. Masalah utamanya bukan pada perbedaan atau keterkaitan itu sendiri, tetapi bagaimana hubungan antara pelaku dan struktur harus dipahami, apakah sebagai dualisme

---

<sup>16</sup> Herry Priyono B., "Anthony Giddens Suatu Pegantar" (Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta, 2016). 17

(berdiri terpisah) atau dualitas (saling terhubung dan membentuk satu kesatuan). Giddens menilai bahwa selama ini ilmu-ilmu sosial terjebak dalam pemikiran dualisme, yaitu memisahkan pelaku dan struktur seolah keduanya tidak bisa saling bersentuhan. Untuk itu, ia menolak pandangan tersebut dan justru memperkenalkan konsep dualitas, yang berarti bahwa pelaku dan struktur saling membutuhkan dan saling membentuk. Struktur tidak hanya membatasi tindakan manusia, tapi juga diciptakan dan diperkuat oleh tindakan manusia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup>

Kedua, Giddens menekankan bahwa waktu dan ruang adalah unsur yang sangat penting bukan hanya latar atau tempat dimana tindakan manusia terjadi, tapi justru menjadi bagian inti dari tindakan itu sendiri. Biasanya, waktu dan ruang dianggap hanya sebagai panggung tempat manusia beraktivitas, seperti masuk ke sebuah tempat dan keluar lagi. Namun, menurut Giddens, pandangan seperti itu keliru. Ia menjelaskan bahwa tanpa waktu dan ruang, tindakan manusia tidak bisa terjadi. Misalnya, setiap keputusan atau interaksi pasti berlangsung di waktu tertentu dan di tempat tertentu. Oleh karena itu, waktu dan ruang bukan hanya latar, tapi bagian yang membentuk tindakan dan cara masyarakat diorganisasi. Giddens juga mengkritik pandangan yang memisahkan antara hal-hal yang statis dan dinamis, atau antara kejadian yang berlangsung bersamaan (sinkronik) dan yang berlangsung secara berurutan (diakronik). Bagi Giddens, semua proses sosial baik yang tampak stabil maupun yang berubah

---

<sup>17</sup> Herry Priyono B., " Anthony Giddens ... ". 18

selalu berkaitan dengan dimensi waktu dan ruang. Karena itu, waktu dan ruang harus menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam ilmu-ilmu sosial.<sup>18</sup>

Strukturasi merupakan proses di mana suatu sistem mereproduksi struktur, di mana sistem interaksi terbentuk sebagai hasil dari struktur yang digunakan. Hubungan ini merujuk pada aturan dan sumber daya yang diciptakan oleh struktur yang memungkinkan serta mempertahankan interaksi sosial. Menurut Giddens, struktur yang mencakup tradisi, institusi, kode moral, dan norma sosial bersifat stabil secara umum, tetapi tetap dapat mengalami perubahan, terutama akibat konsekuensi tindakan yang tidak disengaja. Misalnya, ketika individu menyimpang dari norma sosial yang ada, mereka akan menciptakan atau mereproduksi norma baru dengan cara yang berbeda.<sup>19</sup>

Giddens membagi struktur menjadi tiga jenis antara lain:

a. Signifikansi

Signifikansi dapat disebut struktur penandaan atau struktur simbolisasi, yang menciptakan makna melalui sistem bahasa yang tersusun, seperti kode bahasa, cara menafsirkan sesuatu, dan pola komunikasi. Giddens menjelaskan bahwa individu tidak hanya menggunakan bahasa yang sudah ada, tetapi juga dapat menafsirkan dan mengubah maknanya sesuai dengan pemahaman mereka. Struktur penandaan, atau signifikansi, merujuk pada cara-cara di mana masyarakat menggunakan simbol, makna, istilah, dan wacana tertentu dalam kehidupan sosial.<sup>20</sup> Ini mencakup bagaimana sesuatu

---

<sup>18</sup> Herry Priyono B. "Anthony Giddens Suatu Pegantar ... "19

<sup>19</sup> Zainal Abidin Achmad, "Anthony Giddens: Antara Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga," *Antologi Teori Sosial* 9, no. 2 (2021): 112.

<sup>20</sup> Herry Priyono B., "Anthony Giddens ...". 24

diberi nama, bagaimana maknanya dipahami, serta bagaimana simbol-simbol tersebut digunakan dan disebarakan dalam komunikasi sehari-hari. Dalam konteks ini, tindakan sosial tidak lepas dari kerangka simbolik yang telah terbentuk, seperti istilah-istilah lokal, ungkapan adat, atau penamaan tempat, yang memberi makna terhadap suatu peristiwa atau praktik sosial.

b. Legitimasi

Legitimasi yaitu tatanan moral yang mencakup norma, nilai, dan standar sosial. Saat individu berinteraksi, mereka mengungkapkan makna dari perilaku mereka, baik secara sadar, bawah sadar, maupun tanpa disadari. Interaksi semacam ini membentuk norma sosial yang berlaku serta mempertimbangkan aturan moral dalam suatu struktur. Struktur legitimasi adalah sebuah pembenaran keabsahan terhadap tindakan-tindakan seorang aktor yang memiliki struktur sosial. Keabsahan suatu tindakan dalam masyarakat ditentukan oleh struktur legitimasi yang ada.

c. Dominasi

Dominasi dapat disebut proses pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan yang terjadi melalui pengendalian berbagai sumber daya. Giddens menjelaskan bahwa dalam hubungan kekuasaan terdapat unsur dominasi serta ketundukan yang saling memengaruhi.<sup>21</sup> Dominasi dibagi menjadi dua yakni otoritatif dan alokatif. Dalam dominasi otoritatif aktor mampu menguasai

---

<sup>21</sup> Zainal Abidin Achmad, "Anatomy of Structuration Theory and Ideology of the," *Jurnal Translitera* Vol 9, no. 2 (2020): 58, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/989>.

orang lain sedangkan alokatif merupakan kekuasaan kepada barang atau selain orang.

Tindakan dasar manusia dan aktivitas yang dihasilkan merupakan dua aspek utama yang mendefinisikan manusia sebagai agensi. Giddens membedakan antara tindakan sebagai serangkaian aksi yang berdiri sendiri dan aksi sebagai keterlibatan jangka panjang yang dilakukan oleh individu secara berbeda dan mandiri. Tindakan individu dapat muncul dari dorongan untuk mengevaluasi perilaku sendiri atau melalui proses refleksi diri yang disebut pemantauan refleksif.

Model tindakan yang dikembangkan oleh Giddens mencakup tiga elemen utama, yaitu pemantauan refleksif, rasionalisasi, dan motivasi. Masing-masing elemen memiliki peran khusus dalam keseluruhan proses tindakan manusia. Teori strukturasi menekankan bahwa agensi merupakan faktor utama dalam menciptakan berbagai bentuk perubahan. Perubahan ini bisa terjadi dalam bentuk yang sederhana, seperti perpindahan fisik ke lingkungan baru untuk berinteraksi, maupun dalam bentuk yang lebih kompleks, seperti perubahan pola interaksi sosial. Agensi adalah kemampuan individu atau kelompok untuk bertindak secara mandiri dan membuat pilihan.

Giddens menekankan bahwa meskipun struktur sosial dapat membatasi tindakan, individu memiliki kemampuan untuk mengubah struktur tersebut melalui tindakan kolektif. Dalam gerakan sosial, agensi kolektif memungkinkan individu untuk berorganisasi dan berjuang untuk tujuan bersama. Menurut

Giddens struktur dan agensi tidak dapat dipisahkan karena mereka terhubung satu sama lain sebagai dualitas struktur.<sup>22</sup>

## 1. Struktur

Menurut para fungsionalis, konsep struktur merupakan pola relasi sosial atau fenomena sosial yang tercipta dan terjadi berulang. Dalam pandangan lama, khususnya dari para ahli fungsionalis, struktur sosial dianggap sangat penting dan sering dipahami sebagai pola hubungan sosial yang tetap, seperti kerangka atau tiang penyangga dalam bangunan.

Struktur ini dianggap berada di luar diri manusia dan bisa membatasi kebebasan seseorang. Namun, pandangan seperti ini dianggap kurang sesuai dengan perkembangan teori sosial modern. Banyak pemikir akhirnya lebih tertarik membahas fungsi daripada struktur. Dalam pendekatan yang lebih baru, seperti strukturalisme dan post-strukturalisme, struktur dipahami bukan hanya sebagai pola tetap, tapi sebagai sesuatu yang muncul dari hubungan antara apa yang hadir dan tidak hadir dalam kehidupan sosial.

Kemudian teori strukturasi memunculkan cara pandang yang seimbang. Struktur tidak hanya membentuk tindakan manusia tetapi juga dapat dibentuk oleh tindakan itu sendiri. Dalam memahami struktur sosial, kita perlu melihat dua sisi yakni dengan dimensi sintagmatik dan dimensi paradigmatik. Dimensi sintagmatik melihat dari bagaimana hubungan sosial terbentuk dalam waktu dan tempat tertentu sedangkan dimensi paradigmatik melihat aturan-aturan yang terus digunakan dan diulang dalam kehidupan

---

<sup>22</sup> Zainal Abidin Achmad, "Anthony Giddens ..." 59

sosial. jadi struktur sosial bisa terus berubah melalui tindakan manusia sehari-hari.<sup>23</sup>

Struktur lebih seperti alat yang membuat kegiatan sosial bisa berjalan dan berulang di berbagai tempat dan waktu. Karena kebiasaan yang berulang itu, pola-pola tersebut terlihat seperti sistem yang rapi misalnya rutinitas belajar, bekerja, dan beribadah. Struktur merupakan sumberdaya atau seperangkat relasi yang saling mempengaruhi dan teratur yang membantu sistem sosial dapat berjalan sedangkan strukturasi merupakan proses yang memungkinkan struktur dapat dijalankan, dipertahankan, maupun diubah melalui tindakan manusia.<sup>24</sup>

Masyarakat merupakan sebuah sistem sosial, yang mana sistem sosial itu dapat terbentuk dari hubungan-hubungan antara berbagai kelompok atau bagian-bagian masyarakat. Sistem sosial dapat sepenuhnya berada di dalam satu masyarakat atau bahkan terhubung keluar, sehingga membentuk hubungan antar masyarakat. Hubungan ini menghasilkan pola-pola yang beragam, baik berupa kerja sama, ketergantungan, maupun dominasi, yang berlangsung dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Interkoneksi tersebut menegaskan bahwa suatu masyarakat tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terhubung dengan sistem sosial lain yang lebih luas dan membentuk suatu totalitas yang saling memengaruhi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Anthony Giddens, "Teori Strukturasi (Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat)" (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1984). 26

<sup>24</sup> Anthony Giddens, "Teori Strukturasi ..." 40

<sup>25</sup> Anthony Giddens, "Teori Strukturasi ..." 252

## 2. Dualitas Struktur

Teori strukturasi Anthony Giddens adalah upaya untuk mengatasi dualisme mendasar antara agensi dan struktur, sebagai pengganti dualisme ia memunculkan konsep baru yang disebut dualitas. Struktur untuk mengekspresikan hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara agensi dan struktur. Dualitas struktur menjelaskan bahwa struktur sosial dan tindakan manusia (agensi) saling membentuk satu sama lain. Struktur sosial, seperti aturan, norma, atau kebiasaan, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri di luar manusia, melainkan hadir dan hidup dalam tindakan manusia sehari-hari.

Struktur tidak mengontrol manusia dari luar akan tetapi berada dalam ingatan dan tindakan manusia sehari-hari. Sebaliknya, agensi atau kemampuan individu untuk bertindak juga tidak lepas dari pengaruh struktur, karena setiap tindakan biasanya mengikuti pola yang sudah ada. Namun, melalui agensinya, individu juga berperan aktif dalam mereproduksi, bahkan mengubah struktur tersebut. Inilah yang dimaksud dengan dualitas, struktur menjadi sarana bagi agensi, tapi sekaligus menjadi hasil dari agensi itu sendiri.

Jadi, manusia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh struktur, karena mereka juga punya kapasitas untuk mempertahankan atau mengubahnya lewat tindakan-tindakan yang mereka lakukan secara sadar maupun rutin. Intinya dualitas struktur merupakan hubungan dua arah antara aturan-aturan sosial dan tindakan manusia. Tanpa adanya struktur, bagaimana kita akan

bertindak. Begitu juga sebaliknya, tanpa adanya tindakan manusia struktur akan hilang karena tidak ada yang menjalankannya.<sup>26</sup>

## **B. Pariwisata**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata merujuk pada aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan dengan tujuan rekreasi, pelesiran, atau turisme. Kegiatan ini dapat mencakup eksplorasi objek wisata, mencicipi kuliner, menginap di penginapan atau hotel, serta berinteraksi dengan budaya dan lingkungan baru. Selain itu, pariwisata juga dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengelola serta menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan.

Berdasarkan karakteristik dan tujuan perjalanannya, pariwisata memiliki beragam bentuk, seperti wisata cagar alam yang berfokus pada kawasan konservasi, wisata bahari yang berkaitan dengan lingkungan perairan, wisata industri yang bertujuan edukatif, wisata komersial yang terhubung dengan pameran atau kegiatan bisnis, wisata budaya yang menawarkan pembelajaran mengenai adat dan gaya hidup suatu daerah, wisata kesehatan yang memberikan pengalaman pemulihan fisik maupun mental, hingga wisata bulan madu yang dirancang khusus bagi pasangan pengantin. Beragamnya jenis pariwisata ini menunjukkan bahwa kegiatan wisata memiliki dimensi yang luas dan dapat dikembangkan sesuai potensi suatu daerah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Anthony Giddens, *Teori Strukturasi ...* 40

<sup>27</sup> E.W. Wirawan dan I.M.T. Semara, "Modul Pengantar Pariwisata," *IPB Internasional Press*, 2021. 9

## 1. Pengelolaan Pariwisata

Pengembangan pariwisata tentunya diperlukan adanya pengelolaan pariwisata. Pengelolaan dapat diartikan sebagai proses mengendalikan dan memanfaatkan berbagai faktor sumber daya yang telah direncanakan guna mencapai tujuan kerja tertentu. Pengelolaan melibatkan upaya untuk menggerakkan mengorganisasikan serta mengarahkan aktivitas manusia agar dapat menggunakan fasilitas secara efektif demi mencapai suatu tujuan.<sup>28</sup> Dalam pengelolaannya, diperlukan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah, mengingat pemerintah memiliki peran yang sentral dalam pengembangan daerah. Pengelolaan pariwisata diperlukan beberapa tahapan, antara lain:

### a. *Beginning*

Tahap ini merupakan tahap awal dimana pemerintah lebih berperan daripada masyarakat. Peran serta partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata masih belum optimal. Masyarakat masih perlu diarahkan agar dapat berperilaku dan bertindak untuk mendukung perkembangan pariwisata. Proses ini akan lebih mudah dilakukan jika memahami karakter masyarakat yang umumnya memiliki sifat mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan. Tahap ini mencerminkan semangat gotong royong, tetapi belum memiliki aturan maupun dasar hukum yang jelas.

---

<sup>28</sup> Iqbal dan Mohammad Fasyehhudin, "Kewenangan Pengelolaan Wisata Alam Sebagai Destinasi Wisata Daerah Di Wilayah Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* Vol 1, no. 2 (2021): 60, <https://doi.org/10.51825/yta.v1i2.12303>.

*b. Middle*

Tahap selanjutnya adalah tahap tengah, dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam pengembangan pariwisata. Sinergi tersebut dapat menjamin keberlanjutan program serta secara tidak langsung membangun kepercayaan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat akan mulai merasakan manfaat dari industri pariwisata di lingkungan mereka. Situasi ini akan mendorong kesadaran untuk mempertahankan dan memperkuat peran mereka dalam industri pariwisata melalui berbagai kegiatan. Ketika masyarakat sudah merasakan manfaat yang diberikan, maka akan tumbuh rasa kepemilikan terhadap industri pariwisata, menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan mereka. Namun disisi lain, tahap ini mulai memunculkan konflik baik internal maupun eksternal. Konflik disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara pengelola dengan masyarakat maupun komunitas luar.

*c. Advanced*

Pada tahap lanjutan, peran para pelaku dalam industri pariwisata mulai seimbang. Hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat semakin erat serta berjalan secara seimbang. Pada tahap ini, industri pariwisata diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak swasta atau sekadar meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Lebih dari itu, sektor pariwisata juga sudah mulai memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Selain itu, kesadaran akan budaya pariwisata telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat,

termasuk kepedulian mereka dalam menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitarnya.<sup>29</sup>

Dalam perjalanan pengelolaan pariwisata, tentunya pengelola mengalami berbagai tantangan yang dihadapi baik tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal. Adapun tantangan-tantangan pengelolaan pariwisata sebagai berikut:

- a. Adanya konflik internal yang terjadi di sebuah organisasi atau lembaga masyarakat.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan.
- c. Keterbatasan sumberdaya, dana dan infrastruktur yang memadai.
- d. Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

## **2. Konsep Pengelolaan Pariwisata**

### **a. Input**

Input dapat dipahami sebagai seluruh sumber daya yang tersedia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, input mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi, mulai dari ketersediaan tempat atau objek wisata yang menjadi daya tarik utama, kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam

---

<sup>29</sup> Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat” 1 (2018): 163.

pengelolaan maupun pelayanan, keberadaan infrastruktur yang memadai seperti akses jalan, transportasi, sarana komunikasi, hingga fasilitas pendukung wisata.

Selain itu, faktor modal dan investasi juga tidak dapat diabaikan karena menjadi penopang utama dalam pembangunan maupun perawatan destinasi wisata. Selain itu, input dalam pariwisata juga meliputi upaya promosi yang efektif serta kolaborasi yang terjalin dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, komunitas lokal, maupun organisasi lain yang memiliki kepentingan terhadap kemajuan sektor ini. Sinergi antara promosi dan kolaborasi akan memperluas jangkauan informasi, memperkuat branding destinasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang ditawarkan.<sup>30</sup>

Seluruh faktor input tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang menentukan kualitas sekaligus daya saing destinasi wisata. Ketika input dikelola secara optimal, maka pariwisata desa dapat berkembang secara berkelanjutan, mampu menarik lebih banyak wisatawan, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, penguatan input bukan hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan

---

<sup>30</sup> Dioda Ashaab dkk., “Dampak Pariwisata dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wisata Karangrejo melalui Community Based Tourism (CBT),” *Jurnal Nasional Pariwisata* Vol 14, no. 2 (2024): 117.

wisata, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta keberlanjutan destinasi itu sendiri.

b. Proses

Untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata pariwisata yang efektif dan berkelanjutan dibutuhkan serangkaian proses pengelolaan pariwisata yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki. Konsep pengelolaan pariwisata dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik masing-masing tempat.

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan berbagai kegiatan secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian yang lebih luas, perencanaan tidak sekadar menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan, tetapi juga melibatkan penentuan prioritas, penyesuaian dengan kondisi yang ada, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Melalui perencanaan, suatu tujuan dapat dicapai dengan cara yang lebih terarah, terukur, efektif, dan efisien, karena setiap kegiatan telah diorganisir sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, perencanaan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa tujuan tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang tepat dan hasil yang maksimal.

Perencanaan Pengelolaan pariwisata dapat dilakukan dengan menyusun rencana strategis terkait potensi wisata yang akan dikembangkan, target wisatawan yang ingin dicapai, serta strategi pemasaran yang tepat. Perencanaan ini meliputi pemetaan potensi, analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), serta penentuan prioritas program.<sup>31</sup>

## 2) Pengorganisasian

Pengorganisasian dapat dipahami sebagai suatu proses mengatur dan mengelompokkan berbagai unsur penting dalam organisasi, baik berupa individu, sarana, tugas, tanggung jawab, maupun wewenang, agar semuanya dapat berjalan selaras menuju tujuan yang sama. Melalui proses ini, setiap sumber daya yang ada disatukan dan diarahkan secara terstruktur sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian, pengorganisasian tidak hanya berfungsi untuk membagi peran dan kewenangan, tetapi juga untuk menciptakan keterpaduan, keserasian, serta komitmen bersama, sehingga kinerja organisasi dapat berjalan lebih optimal dan efektif. Dalam konteks pariwisata desa, pengorganisasian dapat melibatkan masyarakat lokal, pemerintah desa, pelaku usaha, serta lembaga

---

<sup>31</sup> Farhan Saputra dan Hapzi Ali, "Penerapan Manajemen Poac: Pemulihan Ekonomi Serta Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Literature Review Manajemen POAC)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Vol 3, no. 3 (2022): 318, <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.733>.

swadaya masyarakat yang berperan dalam mendukung keberhasilan destinasi wisata.<sup>32</sup>

### 3) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap yang dijalankan setelah suatu organisasi menyusun perencanaan dan melaksanakan proses pengorganisasian dengan membentuk struktur organisasi yang jelas lengkap dengan penempatan personil sesuai kebutuhan pada masing-masing unit atau satuan kerja.

Kegiatan pada tahap ini dapat meliputi pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendukung wisata penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pengunjung, pengembangan atraksi yang mampu meningkatkan daya tarik destinasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan selain itu strategi promosi dan pemasaran juga dijalankan agar destinasi wisata semakin dikenal luas.

Agar seluruh program dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang ditetapkan, diperlukan koordinasi yang intensif dan sinergi antara pihak yang terlibat, baik pemerintah, pengelola, masyarakat, maupun stakeholder lainnya.<sup>33</sup>

### 4) Evaluasi

---

<sup>32</sup> Sinthia Ririen Endiyanti dan Ahmad Sarwadi, "Pengelolaan Ekowisata Di Desa Wisata Pancoh , Turi , Sleman , Yogyakarta," *Cakra Wisata Jurnal Pariwisata Dan Budaya* Vol 21, no. 4 (2021): 38, <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/view/55209>.

<sup>33</sup> Polikarpus Dore Beda dan Supardal, "Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut Di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* Vol 4, no. 1 (2022): 177, <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i1.44>.

Tahap terakhir dalam proses pengelolaan adalah pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dijalankan. Pada tahap ini, seluruh kegiatan yang dilakukan sebelumnya ditinjau kembali untuk menilai sejauh mana tujuan yang direncanakan berhasil dicapai.

Evaluasi dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti survei kepuasan wisatawan, penilaian terhadap mutu pelayanan, maupun kajian mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata. Proses evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan, tetapi juga sebagai masukan penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan hambatan yang masih ada. Dengan demikian, hasil pengawasan dan evaluasi dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi perbaikan, penguatan, serta inovasi agar pengelolaan pariwisata di masa mendatang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat maupun destinasi itu sendiri.<sup>34</sup>

### c. Output

Dalam konsep pengelolaan pariwisata, output merupakan hasil langsung yang diperoleh dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pengelolaan destinasi wisata. Output ini menjadi indikator keberhasilan pengelolaan dalam jangka pendek dan

---

<sup>34</sup> Jesica Pasaribu, dkk., "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Pulau Penyengat," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol 2, no. 1 (2024): 29, <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i1.40>.

berfungsi sebagai dasar untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan. Bentuk output dapat berupa peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur wisata, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata, serta tersedianya produk dan paket wisata yang inovatif.

Selain itu, output juga dapat terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, membaiknya pelayanan dan kepuasan wisatawan, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata. Di sisi lain, lahirnya kebijakan, dokumen perencanaan, dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan juga termasuk dalam output pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, output tidak hanya mencerminkan hasil yang bersifat fisik dan terukur, tetapi juga menggambarkan sejauh mana proses pengelolaan mampu menciptakan sistem pariwisata yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.<sup>35</sup>

### **3. Tata Kelola Pariwisata**

#### **a. Definisi**

Tata kelola merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi, yang mencakup proses perumusan tujuan, penetapan sasaran, serta pengawasan guna memastikan tercapainya tujuan tersebut. Dalam konteks pariwisata, tata kelola meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

---

<sup>35</sup> Muryani dan Eko Siswahto, "Analisis Sektor Pariwisata Dandampak Pengeluaran Wisatawan Terhadap Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara P," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* Vol 4, no. 1 (2021): 130, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4190>.

pengawasan seluruh kegiatan pengelolaan destinasi secara efektif, efisien, partisipatif, dan berkelanjutan.<sup>36</sup>

Pelaksanaan tata kelola pariwisata melibatkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan, daya saing destinasi, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Konsep tata kelola pariwisata menekankan pentingnya integrasi berbagai aspek, termasuk kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, fasilitas pendukung, pemasaran, partisipasi, kolaborasi, dan keberlanjutan, untuk membangun destinasi wisata yang kompetitif dan berkelanjutan.<sup>37</sup>

## b. Aspek

### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam tata kelola pariwisata, baik sebagai aspek utama maupun faktor penentu keberhasilannya. Kualitas dan kuantitas SDM berperan besar dalam menentukan efektivitas pelaksanaan tata kelola, terutama dalam hal partisipasi, akuntabilitas, serta keberlanjutan program pariwisata.

---

<sup>36</sup> Ida Bagus Separsa Kusuma Daniel Adolf Ohyver, dkk, "PARIWISATA INDONESIA Tata Kelola & Pengembangan Pariwisata di Indonesia", (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). 3

<sup>37</sup> Natasya Ilya Sahira dan Zulkarnaini, "Tata Kelola Destinasi Wisata Melalui Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar," *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling* Vol 1, no. 2 (2023): 55, <https://doi.org/10.57235/jamparing.v1i2.1016>.

Tanpa dukungan SDM yang kompeten, upaya pengelolaan pariwisata tidak akan berjalan optimal dan sulit mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sebaliknya, keberadaan destinasi pariwisata juga dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, sehingga terbentuk komunitas yang mandiri dan berdaya saing.<sup>38</sup>

## 2) Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Infrastruktur dalam pariwisata merupakan sarana fisik dasar yang mendukung kelancaran aktivitas wisata, meskipun tidak secara eksklusif ditujukan bagi wisatawan. Infrastruktur mencakup jalan, jembatan, sistem listrik, air bersih, telekomunikasi, serta transportasi publik. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan secara umum, sehingga destinasi wisata dapat diakses dengan mudah dan kegiatan pengelolaan pariwisata dapat berjalan lancar.

Sementara itu, fasilitas pendukung atau amenities adalah sarana dan layanan yang secara langsung digunakan oleh wisatawan untuk menunjang pengalaman mereka selama berkunjung. Contohnya meliputi hotel, penginapan, restoran, kafe, toilet umum, area parkir, pusat informasi wisata, wahana rekreasi, serta fasilitas penunjang lain seperti klinik wisata dan tempat ibadah. Fasilitas pendukung berfokus pada kenyamanan dan kepuasan wisatawan,

---

<sup>38</sup> Iskandar, dkk, "Tata Kelola Pariwisata Sungai Gelombang Berbasis Masyarakat Di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar," *Jurnal Daya Saing* Vol 7, no. 2 (2021): 204, <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v7i2.658>.

sehingga termasuk aspek utama pariwisata. Ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung mencerminkan efektivitas tata kelola pariwisata dan menjadi indikator daya saing serta kualitas destinasi wisata itu sendiri.<sup>39</sup>

### 3) Pemasaran dan Promosi

Pemasaran merupakan aspek penting dalam tata kelola pariwisata karena berperan dalam memperkenalkan destinasi kepada calon wisatawan dan meningkatkan daya tariknya di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pemasaran pariwisata meliputi strategi untuk menentukan target pasar, segmentasi wisatawan, penentuan produk wisata yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengunjung, serta penentuan citra destinasi agar memiliki daya saing yang jelas. Promosi dilakukan melalui berbagai media, termasuk pemasaran digital, media sosial, brosur, event, dan kampanye branding yang menonjolkan keunikan destinasi.

Keberhasilan pemasaran dan promosi tidak hanya berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan keberlanjutan destinasi. Dengan strategi pemasaran dan promosi yang tepat, pemerintah dan pengelola wisata dapat memaksimalkan potensi objek wisata, menarik investasi, serta memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan pariwisata.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Edy Purwanto dan Hetti Mulyaningsih, "Agensi Kelembagaan Modal Sosial Dalam Tata Kelola Wisata Bahari di Pantai Martajasah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur," *Indonesian Journal of Tourism and Leisure* Vol 5, no. 2 (2024): 116, <https://doi.org/10.36256/ijtl.v5i2.408>.

<sup>40</sup> Edy Purwanto dan Hetti Mulyaningsih, "Agensi Kelembagaan ... 114

#### 4) Partisipasi

Partisipasi dan kolaborasi merupakan aspek penting dalam tata kelola pariwisata karena memastikan berbagai pihak dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan destinasi. Partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat lokal, pelaku usaha, pemerintah, serta lembaga nonpemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pariwisata.

Dengan adanya partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga pelaku aktif yang memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas destinasi. Sementara itu, kolaborasi menekankan pentingnya kerja sama antar pihak (multi-stakeholder), baik antarinstansi pemerintah, swasta, komunitas lokal, maupun akademisi, untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kolaborasi, sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal, masalah dapat diselesaikan bersama, dan inovasi dalam pengelolaan pariwisata dapat muncul lebih efektif.

Dengan demikian, partisipasi dan kolaborasi tidak hanya meningkatkan efektivitas tata kelola, tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pengembangan destinasi wisata.<sup>41</sup>

#### 5) Keberlanjutan

---

<sup>41</sup> I Wayan Nuada & Sri Wahyuningsih Baiq Dea Rosdiana Dewi, "Penerapan Pengaturan Pengunjung Dalam Mengurangi Dampak Lingkungan Di Wisata Purekmas Sesat," *Journal Of Responsible Tourism* 10, no. September (2025): 351.

Keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam tata kelola pariwisata. Aspek ini menekankan keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya. Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian budaya lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari strategi pariwisata berkelanjutan.

Dengan penerapan semua aspek ini secara terpadu, destinasi wisata tidak hanya dapat berkembang secara optimal, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian lokal.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Syahid Sirih dkk., “Adaptasi Kebijakan Pengelolaan Wisata untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Panai Dato,” *Journal of Tourism and Creativity* 8, no. 1 (2024): 26, <https://doi.org/10.19184/jtc.v8i1.44187>.